

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 3 September 2020

Sumber Pengambilan Dokumen

A	Provinsi Jawa Barat	
	Serapan Anggaran BTT Jabar Lebih dari 50%	<i>Pikiran Rakyat/ Hal. 3</i>
B	Kota Cimahi	
	Puluhan Mobil Dinas Pemkot Bakal Dilelang	<i>Galamedia/Hal. 8</i>
	Nakes Dapatkan Instentif Rp 3,8 Miliar	<i>Galamedia/Hal. 8</i>

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Serapan Anggaran BTT Jabar Lebih dari 50%

Entitas / Cakupan : Provinsi Jawa Barat

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/ Hal. 3

Edisi : Kamis, 3 September 2020

Serapan Anggaran BTT Jabar

Lebih dari 50%

BANDUNG, (PR).-

Anggaran belanja tidak terduga (BTT) Provinsi Jawa Barat untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 4,5 triliun. Anggaran itu digunakan untuk bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Gubernur Ridwan Kamil mengatakan bahwa penyerapan anggaran BTT hampir setengah dari total BTT. Hal itu menunjukkan keseriusan dan komitmen Pemprov Jabar dalam perang melawan Covid-19.

"Penyerapan BTT untuk bantuan sosial sudah 48,4 persen (dari anggaran Rp 3,895 triliun), dan BTT untuk kesehatan sudah 78 persen (dari anggaran Rp 607 miliar)," ujarnya dalam

jumpa pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (2/9/20).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat Nanin Hayani Adam melaporkan, anggaran BTT untuk penanganan Covid-19 terealisasi Rp 2,3 triliun. "Untuk penanganan kesehatan Rp 423 miliar, untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 1,8 triliun," kata Nanin.

Salah satu jaring pengaman sosial adalah bantuan sosial (bansos) provinsi berupa tunai dan nontunai senilai Rp 500.000.

Penyerapan bansos untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meminimalkan risiko lonjakan kemiskinan dan pengangguran di

tengah pandemi Covid-19.

Nanin mengatakan, penyesuaian anggaran BTT intens dilakukan. Hingga kini, sudah ada pergeseran anggaran sampai lima kali.

Perubahan perencanaan anggaran BTT terus disesuaikan dengan kondisi penanganan Covid-19.

"Kita tidak bisa memprediksi kapan pandemi berakhir. Di bidang kesehatan, pembelian kebutuhan penanganan Covid-19 terus berjalan. Di jaring pengaman sosial, data terus bergerak. Maka, kami harus menyesuaikan perencanaan anggaran dengan kondisi tersebut," ucapnya.

Terbesar

Sementara itu, Kepala Di-

nas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Berli Hamdani mengatakan, pos terbesar anggaran BTT di bidang kesehatan dimanfaatkan untuk pengadaan perlengkapan tes Covid-19, alat pelindung diri (APD), alat kesehatan, serta bahan habis pakai laboratorium.

"Saat awal pandemi, permasalahan yang dihadapi adalah ketersediaan barang di pasaran dan tingginya harga barang," ujarnya.

Anggaran BTT kesehatan dimanfaatkan juga untuk memenuhi operasional pusat isolasi pasien Covid-19, baik pusat isolasi rumah sakit rujukan maupun non rumah sakit.

Selain itu, anggaran BTT kesehatan digunakan untuk

meningkatkan kapasitas pengetesan (testing) metode uji usap (*swab test*) *polymerase chain reaction* (PCR).

"Untuk mengejar standar WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) melakukan *swab test* kepada 1 persen penduduk, kami memerlukan mesin PCR dan perlengkapan tes seperti bahan habis pakai laboratorium," kata Berli. **(Novianti Nurulliah)*****

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Puluhan Mobil Dinas Pemkot Bakal Dilelang
Entitas / Cakupan	: Kota Cimahi
Sumber / Hal	: Galamedia/Hal. 8
Edisi	: Kamis, 3 September 2020

Puluhan Mobil Dinas Pemkot Bakal Dilelang

D. HARDJAKUSUMAH, (GM).-

Sebanyak 43 kendaraan roda empat (mobil) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, bakal dilelang dalam waktu dekat. Penghapusan dengan cara lelang terhadap kendaraan pelat merah tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap.

Proses pelelangan tahap pertama akan dilakukan pada 7 September mendatang untuk 20 unit kendaraan dari berbagai jenis, kemudian tahap kedua akan dilaksanakan pada 14 September untuk 23 unit kendaraan.

Kepala Seksi (Kasi) Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Ira Triana mengatakan, lelang barang milik daerah (BMD) tersebut akan dilakukan secara online dan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung.

"Untuk peminat silahkan daftar secara online melalui www.lelang.go.id. Kita sudah dapat jadwalnya dari KPKNL, yakni pada tanggal 7 dan 14 September," terang Ira di Pemkot Cimahi, Jln. Demang Hardjakusumah, Rabu (2/9).

Ira menjelaskan, para peserta yang ingin mendapatkan kendaraan pelat merah tinggal mendaftar melalui laman tersebut. Kemudian melakukan penawaran terhadap barang yang diinginkan. Setelah dinyatakan jadi pemenang, peserta harus membayar down payment (DP) sebesar 50 persen dari harga aset. Selanjutnya peserta harus melunasi pembayaran melalui KPKNL, dan nanti bukti pembayarannya dijadikan bukti pengambilan kendaraan dari Pemkot Cimahi.

"Kalau sudah deal ditetapkan pemenang, nanti diprint sebagai barang bukti untuk pengambilan," jelasnya.

Ira menyebutkan, berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh pihak ketiga, nilai total puluhan kendaraan roda empat yang dilelang mencapai sekitar Rp 5 miliar. Namun untuk nilai lelang per unitnya berbeda-beda karena tergantung kondisi, jenis, dan tahun kendaraan.

Menghemat biaya

Ira mencontohkan jenis Toyota Avanza keluaran tahun 2011 yang memiliki nilai limit (minimal penawaran) Rp 44.124.000, kemudian Suzuki Escudo keluaran tahun 2001 yang memiliki nilai limit Rp 34.192.800.

"Jadi kalau ingin menang lelang, tentu harus mengajukan penawaran lebih tinggi dari nilai limit," terang Ira.

Ira menjelaskan, lelang dilakukan terhadap kendaraan yang sudah berumur tujuh tahun sesuai batas pengajuan minimal pelelangan. Kebijakan penghapusan kendaraan dengan cara dilelang tersebut dilakukan untuk menghemat biaya pemeliharaan kendaraan, pengeluaran bahan bakar minyak (BBM), dan anggaran untuk asuransi.

"Kendaraannya bukan rusak berat, tapi ada kebijakan kendaraan berusia 7 tahun dihapuskan," tandasnya.

(B.110)**

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Nakes Dapatkan Insentif Rp 3,8 Miliar
Entitas / Cakupan	: Kota Cimahi
Sumber / Hal	: Galamedia/Hal. 8
Edisi	: Kamis, 3 September 2020

Nakes Dapatkan Insentif Rp 3,8 Miliar

D. HARDJAKUSUMAH, (GM).-

Tenaga kesehatan (nakes) di Kota Cimahi sudah mendapatkan insentif penanganan pandemi Covid-19. Namun, insentif yang diterima para nakes tersebut baru untuk bulan Maret, April, dan Mei.

Dalam tiga bulan sejak pandemi Covid-19 mewabah, tercatat anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai Rp 3.804.237.029 yang bersumber dari Dana Alokasi Fisik (DAK) atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari pemerintah pusat. Rinciannya pencairan insentif tenaga kesehatan bulan Maret sebesar Rp 650.676.000 untuk 124 orang, April Rp 1.186.230.000 untuk 261 orang, dan bulan Mei Rp 1.967.331.029 untuk 392 orang.

Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi, Dikke Suseno menjelaskan, besaran anggaran yang sudah cair tersebut hanya untuk tenaga kesehatan di Dinkes yang menangani Covid-19, puskesmas, dan RSUD Cibabat. Sedangkan untuk rumah sakit lainnya yang melayani pasien Covid-19, pencairannya dilakukan secara mandiri.

"Kami bayarkan yang Dinkes, puskesmas sama RSUD. Intensif yang baru cair bulan Maret, April, dan Mei. Untuk Juni dan selanjutnya, masih menunggu petunjuk pusat," terang Dikke yang juga bertugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOK tahun 2020 di Pemkot Cimahi, Jln. Demang Hardjakusumah, Rabu (2/9).

Menurutnya, kebijakan pemberian insentif terhadap nakes yang terlibat dalam penanganan virus corona tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.

Dikke menjelaskan, untuk besaran insentifnya dibedakan antara tenaga medis yang bekerja di rumah sakit rujukan penanganan Covid-19, dan tenaga medis di fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas sesuai yang tertera dalam Kepmenkes.

Tergantung verifikasi

Ditambahkan, untuk tenaga kesehatan yang menangani kasus Covid-19 di rumah sakit rujukan seperti RSUD Cibabat rinciannya untuk dokter spesialis mencapai Rp 15 juta, dokter umum dan gigi Rp 10 juta, bidan dan perawat Rp 7,5 juta, serta tenaga medis lainnya Rp 5 juta.

Kemudian untuk tenaga medis di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang membantu penanganan Covid-19 diberikan insentif maksimal Rp 5 juta untuk dokter, dan Rp 5 juta untuk bidan serta perawat. Sementara untuk santunan kematian, besarnya ditetapkan Rp 300 juta.

"Kalau tenaga kesehatan dan puskesmas di Cimahi sekitar Rp 5 juta, sedangkan rumah sakit beda lagi," jelas Dikke.

Disebutkan, jumlah tenaga kesehatan yang menerima pun akan berbeda setiap bulannya. Ia mencontohkan untuk bulan Maret hanya 124 orang penerima, karena saat ini jumlah kasusnya memang belum melonjak.

"Kemudian penerimanya naik di bulan April, seiring bertambahnya kasus yang berarti tenaga kesehatan yang terlibat pun semakin banyak. Jadi kalau penerimanya itu tergantung verifikasi. Misalnya di RSUD Cibabat membuat laporan berapa orang yang terlibat, baru diusulkan," bebernya. **(B.110)****